

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Hampir tidak ada negara yang melaksanakan pembangunan ekonominya hanya dengan mengandalkan sumber pembiayaan dari dalam negeri. Sarana mempercepat proses pembangunan semakin disadari arti pentingnya oleh negara-negara industri maupun negara berkembang sendiri.¹ Dalam perkembangan selanjutnya, masalah investasi menjadi sesuatu yang penting karena dapat memainkan peran utama ke arah perbaikan ekonomi pada dunia berkembang.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang telah banyak merasakan perubahan dalam hal investasi. Investasi asing yang banyak berpengaruh di Indonesia adalah investasi asing dari Jepang. Peningkatan investasi Jepang di Indonesia pernah dialami negara Indonesia dalam waktu yang cukup lama. Bahkan investasi Jepang sempat menurun karena adanya krisis ekonomi di Indonesia yang berpengaruh terhadap berbagai aspek.

Untuk mengetahui perkembangan investasi Jepang di Indonesia, maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah judul : "PENINGKATAN

¹ Ohin G., *The Evolution of Adid Doctrine* dalam J. Bhagwati dan R.S Eckaus, eds, *Foreign Aid*, (Penguin Book, 1970), dikutip dari tulisan Basri Hasanuddin, "Dana Luar Negeri dalam APBN", *PRISMA* No.5/1984.

INVESTASI JEPANG DI INDONESIA PADA PERIODE 2003 – 2004².

Jepang dalam hal ini sengaja dipilih karena Jepang merupakan negara donatur terbesar untuk Indonesia. Jepang merupakan salah satu negara yang kaya telah banyak memberikan kontribusi untuk pembangunan di berbagai sektor di Indonesia, salah satunya adalah sektor ekonomi.²

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini penulis bertujuan :

1. Untuk mengetahui perkembangan investasi portofolio Jepang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya investasi portofolio Jepang di Indonesia pada periode 2003 – 2004.
3. Untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.
4. Untuk membuktikan hipotesa yang ada.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan suatu bangsa, khususnya pembangunan ekonomi, sebagai titik beratnya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bangsa yang menuju perekonomian yang mapan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perekonomian yang

² “Awal Puncak Perekonomian Jepang”, di download tanggal 06 September 2006. Tersedia di www.investorindonesia.com/utama.cgi?artikel&1081340220&8.

didukung oleh adanya kegiatan investasi. Untuk keperluan pembangunan itu sendiri dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang hanya tercipta melalui proses-proses transformasi berbagai sumber daya, modal, lahan, tenaga kerja serta perangkat peraturan yang mendukungnya.

Iklm investasi dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Semua variabel tersebut akan membentuk suatu iklim yang akan menjadi acuan bagi investasi dalam negeri maupun luar negeri dalam menentukan lokasi investasi yang paling menguntungkan untuk berproduksi dalam rangka mengantisipasi globalisasi ekonomi. Globalisasi mengubah secara drastis pola produksi perusahaan dalam negeri maupun asing yang semula berupaya untuk memproduksi semua kebutuhan menjadi spesialisasi produksi, yaitu hanya memproduksi bagian-bagian tertentu saja, dan bagian-bagian lainnya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai supplier.³

Di Indonesia bentuk investasi asingnya meliputi investasi asing langsung dan investasi asing tidak langsung. Investasi asing langsung dapat dilakukan dengan cara membeli langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Sedangkan investasi asing tidak langsung dilakukan dengan cara membeli saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva

³ "Jepang Donor Bilateral Terbesar Indonesia ", di download tanggal 08 September 2006. Tersedia di <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2004/1227/keu2.html>.

keuangan dari perusahaan-perusahaan lain.⁴ Dibanding dengan investasi portofolio, investasi asing langsung lebih banyak memiliki kelebihan. Selain sifatnya permanen atau jangka panjang, juga memberi andil terhadap alih teknologi, alih ketrampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru.

Krisis mata uang yang dialami Indonesia sejak Juli 1997, yaitu dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, telah mendorong Indonesia masuk ke dalam krisis ekonomi dan politik. Krisis yang terjadi di Indonesia ini bermula ketika Thailand mengalami penurunan nilai mata uang secara drastis yang menjadi krisis keuangan dan perbankan. Krisis yang terjadi di Thailand kemudian menjalar ke negara-negara di Asia Tenggara dan meluas ke Asia seperti Malaysia, Filipina, Hongkong, Korea Selatan dan juga Jepang yang mengakibatkan resesi berkepanjangan di negara Indonesia karena keadaan perekonomian Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Hal itu disebabkan oleh faktor lemahnya struktur perekonomian nasional, tingginya utang pemerintah maupun swasta, lemahnya sistem finansial dan tidak konsistennya perilaku pemerintah dalam melaksanakan reformasi ekonomi dan dalam setiap pengambilan kebijakan. Terjadinya krisis ekonomi dan politik menyebabkan hilangnya kepercayaan investor asing akan kondisi perekonomian dan masalah keamanan di Indonesia. Banyak investor asing yang pergi dari Indonesia, dan

⁴ Jogiyanto, H.M, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta, BPFE, hal 8-10.

banyak juga investor asing yang membatalkan rencana penanaman modalnya ke Indonesia.

Krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 - 1998 merupakan contoh dari dampak negatif globalisasi finansial yang sangat mempengaruhi bagi perekonomian. Diukur dari berbagai segi, krisis ekonomi dan perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 - 1998 itu adalah merupakan salah satu yang terparah dalam sejarah hidup manusia. Pemerintah telah mengeluarkan surat utang senilai Rp. 650,7 triliun atau setara dengan separuh dari nilai Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 1988 - 1999 untuk menambah modal bank nasional dan mengambil alih kerugian akibat dari krisis. Akibat dari krisis itu, tingkat laju ekonomi pertumbuhan Indonesia telah menurun dengan tajam, lebih dari minus 13 %, tingkat laju inflasi dan tingkat suku bunga meningkat hingga di atas 70 %, sedangkan nilai tukar rupiah telah merosot secara drastis sekitar 80 % pada tahun 1998.⁵

Selain itu, puluhan industri terpaksa ditutup karena kekurangan bahan baku yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka pengangguran yang luar biasa. Hingga tahun 2002 pengangguran tercatat sekitar kurang lebih 43 juta orang, yang berarti sekitar 50 % dari angkatan kerja.⁶

⁵ "Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Setelah Krisis 1997 - 1998", di download tanggal 10 Desember 2006. Tersedia di <http://www.forum-rektor.org/opini.php?hal=2&no=20>.

⁶ "Sekilas Ekonomi Indonesia", di download tanggal 20 September 2006. Tersedia di <http://dte.gn.apc.org/Aif30.htm>.

Laporan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade Development*) tahun 2002 menyebutkan Indonesia merupakan negara yang mengalami penurunan investasi yang paling tajam dan juga dinilai sebagai wilayah yang beresiko sebagai tempat untuk berbisnis dibanding negara tetangganya seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia. Indonesia berada pada tingkat 138 dari 146 negara. *International Country Risk Group* (ICRG) hanya memberikan nilai 4,5 dalam skala 12 bagi iklim investasi di Indonesia. Angka ini jauh di bawah Malaysia dan Thailand yang mendapat nilai 8,5, Korea Selatan dengan nilai 9, Filipina dengan nilai 10. Padahal pasca tragedi WTC sekitar September 2001 ICRG masih memberikan nilai yang lebih tinggi, yaitu 7,5 walaupun Indonesia masih menempati urutan terbawah.⁷

Pengalaman Indonesia selama ini menunjukkan betapa pentingnya investasi bagi kelangsungan pembangunan atau pertumbuhan ekonominya. Jepang merupakan investor yang paling dominan di Indonesia. Seiring dengan adanya krisis di Indonesia, investasi Jepang mengalami penurunan yang cukup tajam yang terlihat dari investasi negara tersebut ke Indonesia pada tahun anggaran yang berakhir 31 Maret 1999 anjlok 55 %, yakni dari 308,5 milyar yen menjadi 137,8 milyar yen.⁸ Nilai investasi Jepang terus mengalami penurunan pada tahun 2001 – 2002.

⁷ "Retorika Memacu Investasi", di download tanggal 06 September 2006. Tersedia di <http://www.tvri.co.id/print.php?berita=27>.

⁸ "Investasi Jepang di Indonesia Anjlok 55 %", *Kompas*, 12 Juni 1999, di download tanggal 06 September 2006. Tersedia di <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9910/19/ekonomi/inve02.htm>.

Posisi Indonesia sebagai negara tujuan investasi investor Jepang pada tahun 2000 hingga tahun 2002 berada di peringkat keempat. Sementara Cina sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 selalu menempati posisi pertama. Urutan selengkapnya adalah Cina, Amerika Serikat, Thailand, Indonesia, Malaysia, Taiwan, India, Vietnam, Korea Selatan dan Filipina. Di Indonesia, Jepang sampai saat ini masih menduduki peringkat pertama negara yang paling banyak menanamkan modalnya. Data pemeringkatan tersebut merupakan hasil survei JBIC sejak tahun 1999 yang dilakukan terhadap 932 pengusaha Jepang.⁹ JBIC (*Japan Bank for Internasional Coop*) adalah lembaga keuangan pemerintah Jepang yang didirikan pada tanggal 1 oktober 1999. Lembaga keuangan ini merupakan gabungan antara Bank Ekspor-Impor Jepang (Jexim) dengan Dana Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri Jepang (OECF).

Minat pengusaha Jepang untuk mengadakan investasi di Indonesia masih sangat besar, karena selain secara geografis berdekatan, Indonesia juga merupakan pasar domestik yang besar. Namun demikian, mereka terus menekankan perlunya dilakukan perbaikan-perbaikan dibidang infrastruktur, kebijakan investasi yang transparan dan *fair* serta stabilitas sosial politik dalam negeri guna menjamin kelangsungan investasi mereka di Indonesia.

Pemerintah pada akhirnya perlu untuk mengeluarkan kepres mengingat cukup banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang

⁹ "Merintis Kembali Harapan", di download tanggal 09 September 2006. Tersedia di <http://www.kompas.com/index.htm>.

berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha atas kegiatan investasi yang dilakukan di daerah. Pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah ini diharapkan dapat menjadi suatu langkah yang positif untuk menarik investasi asing, karena dengan pengurusan ijin langsung pada daerah-daerah yang akan dijadikan sebagai tempat investasi, kemungkinan akan memakan waktu lebih cepat dalam pengurusan surat ijinnya.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, peraturan ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Masalah timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun demikian, isi pasal 11 UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah tidak dijelaskan lebih lanjut secara teknis, sehingga pada pelaksanaannya penanaman modal daerah seringkali menimbulkan kendala yang dikeluhkan oleh para investor, yaitu tidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar.¹¹

Investasi langsung di Indonesia pasca krisis tidak menunjukkan peningkatan, bahkan sebaliknya. Perkembangan FDI sebelum krisis mengalami pertumbuhan positif dan mencapai puncaknya sebesar US\$ 6,2 milyar pada 1996. Tetapi, pada 1997 menjadi awal bagi pertumbuhan negatif

¹⁰ "Sentralisasi Perizinan Investasi di Tengah Semangat Otonomi Daerah", didownload tanggal 11 Februari 2007. Tersedia di <http://www.lpem.org/item.php?id=75&type=>.

¹¹ *Ibid.*

investasi asing. Kemudian tahun 1999 menorehkan catatan buruk bagi investasi dengan terjadinya defisit investasi yang terus berlanjut hingga 2003. Defisit FDI tahun 2002 tercatat sebesar US\$ 1,5 milyar.

Berdasarkan data BKPM, laporan persetujuan investasi menunjukkan data yang besar, tetapi hanya sedikit dari persetujuan itu yang terealisasi. Data BKPM menunjukkan pada 2001 persetujuan investasi asing mencapai 1334, namun yang direalisasikan hanya 376 proyek dengan nilai US\$ 2,79 milyar. Tahun 2002, persetujuan investasi asing menurun menjadi 1151 proyek, sedangkan proyek yang terealisasi naik menjadi 425 proyek dengan nilai US\$ 9,52 milyar. Persetujuan investasi asing pada 2003 hingga periode September hanya mencapai 773 proyek sedangkan realisasi baru mencapai 338 proyek dengan nilai US\$ 2,03 milyar.¹²

Investasi di Indonesia diakui menghadapi banyak kendala. BKPM menginventarisir berbagai hambatan investasi.¹³ Kendala internal adalah kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai, kesulitan memperoleh bahan baku, kesulitan dana/pembiayaan, kesulitan pemasaran, adanya sengketa atau perselisihan di antara pemegang saham.

Sedangkan kendala eksternal adalah faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya

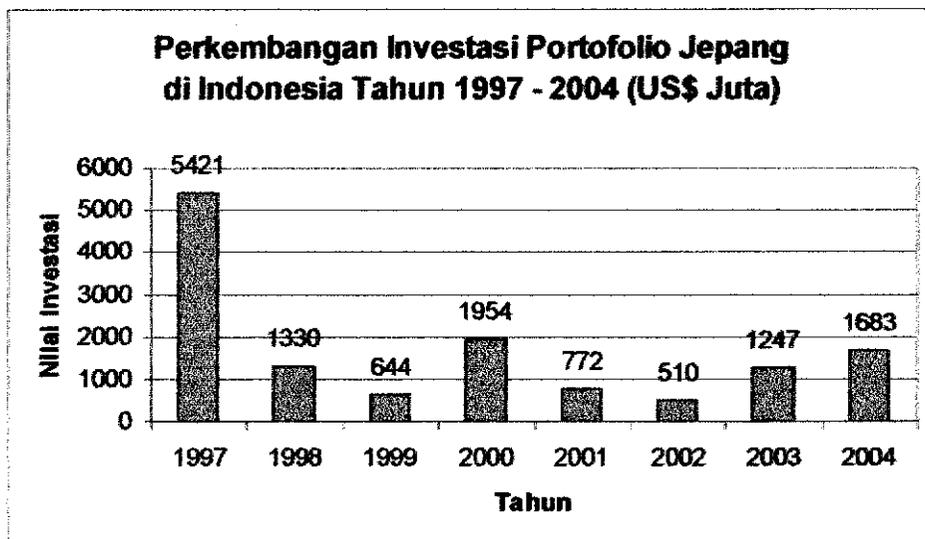
¹² "Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Kerja", di download tanggal 05 Desember 2006. Tersedia di <http://www.sinarharapan.com/v3/content/view/38/56/>.

¹³ *Ibid.*

insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah. Selain itu, masalah perburuhan, pajak dan perijinan usaha juga menjadi kendalanya.

Investasi langsung di Indonesia pasca krisis tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Akan tetapi investasi portofolio justru menunjukkan pergerakan lebih besar dibandingkan investasi langsung. Investasi asing Jepang berbentuk portofolio meningkat pada tahun 2003 yang mencapai US\$ 1,2 milyar dan US\$ 1,6 milyar pada tahun 2004, yang sebelumnya hanya US\$ 510 juta pada tahun 2002.¹⁴

Grafik 1.1



Sumber : BKPM

¹⁴ "Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Kerja", di download tanggal 05 Desember 2006. Tersedia di <http://www.sinarharapan.com/v3/content/view/38/56/>.

Pada Grafik 1.1 menunjukkan bahwa persetujuan investasi Jepang di Indonesia anjlok 55 % menjadi US\$ 1.330 juta pada tahun 1998, setelah sebelumnya tahun 1997 mencapai titik tertinggi sebesar US\$ 5.421 juta. Pada tahun 1999 nilai investai Jepang hanya mencapai US\$ 644,3 juta. Tahun 2000 nilai investasi Jepang meningkat menjadi US\$ 1.954,8 juta. Investasi Jepang mengalami penurunan mencapai US\$ 510 juta pada tahun 2002, setelah sebelumnya tahun 2001 mencapai US\$ 772 juta. Tahun 2003 nilai investasi Jepang meningkat signifikan menjadi US\$ 1247 juta dan pada tahun 2004 nilai investasi Jepang meningkat menjadi US\$ 1683 juta.

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis menetapkan pokok permasalahan yaitu :

“ Mengapa investasi portofolio investor Jepang di Indonesia pada periode 2003 – 2004 mengalami peningkatan jika dibandingkan investasi langsung ?”

E. Kerangka Dasar Teoritik

Dalam menganalisa suatu masalah, agar lebih mudah dipahami maka diperlukan sebuah teori. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori dalam hal ini digunakan sebagai kerangka dasar analisa dalam menjelaskan suatu fenomena itu terjadi dan mungkin juga

meramalkan kejadian itu di masa datang. Untuk itu penulis akan mencoba menggunakan Teori Penanaman Modal. Teori ini dikemukakan oleh Alan M. Rugman. "*The factors which determine the foreign investment are the environment variable and the internalization variable*". Teori ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor, yakni variabel lingkungan dan variabel internalisasi.¹⁵

a. Variabel Lingkungan

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan, yaitu ekonomi, non ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja dan modal (dana), teknologi dan tersedianya sumber daya alam dan ketrampilan manajemen. Adapun variabel non ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, hukum dan sosial budaya yang melekat pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang

¹⁵ Alan M. Rugman, 1985, *International Bussiness : Form and Environment*, New York : Mc Graw Hill Book, hal 73-75.

bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah ataupun pemerintah asal penanam modal itu.¹⁶

Berdasarkan hasil-hasil studi kualitatif yang dilakukan di tahun 1990-an menemukan korelasi positif dan signifikan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi, dimana dikatakan bahwa investasi bukan progres ekonomi, tetapi merupakan faktor utama dibalik pertumbuhan yang pesat. Investasi dapat menambah jumlah lapangan kerja, dalam hal ini akan berpengaruh pada meningkatnya hasil produksi.¹⁷

Pada tahun-tahun terakhir ini peringkat Indonesia dalam daya saing global mengalami peningkatan sebagaimana penilaian World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2004. Peringkat Indonesia meningkat dari posisi 72 ke posisi 69 dari 104 negara yang bersaing dalam investasi global. Sejalan dengan membaiknya peringkat Indonesia dalam persaingan investasi global, perhatian dunia internasional terhadap Indonesia juga meningkat seiring dengan situasi sosial politik yang semakin membaik.¹⁸

Perbaikan kondisi pasar PMA disebabkan oleh adanya dukungan kebijakan pemerintah berbentuk kebijakan fiskal yang

¹⁶ *Ibid*, hal 76.

¹⁷ Tambunan, Tulus T.H, 2001, *Transformasi Ekonomi di Indonesia : Teori dan Penemuan Empiris*, Jakarta, Salemba Empat, hal 42.

¹⁸ "Prospek Ekonomi Indonesia Stagnan, Ekonomi Regional Tumbuh Positif", di download tanggal 05 Oktober 2006. Tersedia di www.kapanlagi.com/index.html.

dikeluarkan melalui kebijakan Bank Indonesia. Dengan memperhatikan prospek ekonomi-moneter ke depan dan sasaran inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia pada awal tahun serta mencermati berbagai tantangan yang muncul, dalam tahun 2003 Bank Indonesia akan berupaya untuk secara konsisten dan berhati-hati menempuh kebijakan-kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.

Di bidang moneter, kebijakan moneter secara konsisten akan diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi IHK sebesar 9 % pada tahun 2003 dalam rangka memenuhi komitmen pencapaian sasaran inflasi jangka menengah sebesar 6 % - 7 % pada tahun 2006.¹⁹

Di bidang perbankan, kebijakan di bidang perbankan masih meneruskan program penyehatan perbankan dan ketahanan sistem perbankan, dengan lebih menekankan pada pengawasan bank berbasis risiko.²⁰

Di bidang sistem pembayaran tunai, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengedaran uang kepada masyarakat melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan upaya untuk meningkatkan penanggulangan peredaran uang palsu. Di bidang sistem pembayaran

¹⁹ "Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia Tanggal 5 Februari 2003", di download tanggal 11 Februari 2007. Tersedia di <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3D67A8F1-F0F4-4F8E-A6EC-2D96ABB8778F/364/RakerDPR50203.pdf>

²⁰ *Ibid.*

non tunai, kebijakan di tahun 2003 diarahkan pada upaya untuk mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.²¹

Beberapa pakar berpendapat, ada kemungkinan “perbaikan” kondisi pasar modal PMA ini langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh membaiknya nilai peringkat praktek *Good Corporate Governance* (GCG) sektor korporasi di Indonesia. Survei yang dilakukan oleh *Credit Lyonnais Securities Asset* (CLSA) tahun 2003 memberikan skor untuk praktek GCG di Indonesia 3,2 atau naik dari semula 2,9 pada tahun 2002.

Kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia ini telah memberikan dampak positif bagi kondisi makro ekonomi dan moneter di Indonesia. Membaiknya kondisi makro ekonomi mulai tampak dalam indikator sehari-hari, seperti menguatnya rupiah, menurunnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, terkendalinya inflasi serta akan tercapainya pertumbuhan ekonomi seperti yang diperkirakan.²²

Kondisi perekonomian Indonesia dalam tahun 2003 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari membaiknya beberapa indikator ekonomi Indonesia seperti *Gross Domestic Bruto* (GDP) yang pada tahun 2003 menunjukkan

²¹ *Ibid.*

²² “Pemilihan Umum dan Stabilitas Ekonomi”, *Kompas*, 4 Juni 2003, di download tanggal 05 Oktober 2006. Tersedia di www.kompas.com/index.htm.

peningkatan 7,06 % dibanding dengan GDP pada periode yang sama tahun 2002 (kuartal I s.d III). Begitu pula cadangan devisa pemerintah sebagai alat stabilisasi nilai tukar rupiah yang berada pada posisi US\$ 35,85 juta per Desember 2003.²³

Disamping itu, relatif stabilnya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan lebih meningkatkan kepercayaan pemodal dalam menginvestasikan dananya di pasar modal Indonesia. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran Rp. 8.420/dolar AS, sedang pada posisi akhir Desember 2002 masih berada pada kisaran Rp. 8.950/dolar AS. Faktor lainnya yang mendorong maraknya industri pasar modal adalah semakin menurunnya tingkat suku bunga SBI satu bulan. Pada akhir Desember 2003 berada pada level di bawah dua digit yaitu 8,31 %.²⁴

b. Variabel Internalisasi

Variabel internalisasi bisa juga disebut sebagai keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal, dimana setiap penanam modal sebisa mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat

²³ "Perkembangan Bursa Regional dan Indonesia", di download tanggal 26 Desember 2006. Tersedia di http://www.bapepam.go.id/profil/lap_tahunan/2003/e_perkembangan_bursa_2003.pdf.

²⁴ *Ibid.*

keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.²⁵

Pengertian dari keunggulan spesifik perusahaan/penanam modal adalah perusahaan/penanam modal harus memiliki keunggulan spesifik dalam kepemilikan bila berhadapan dengan perusahaan/penanam modal dari negara lain dalam melayani pasar tertentu (terutama pasar luar negeri).²⁶

Keunggulan yang dimiliki pasar Jepang adalah banyak perusahaan Jepang di Indonesia yang jenis produksinya membutuhkan banyak tenaga kerja atau perusahaan padat karya, salah satu contohnya adalah perusahaan Toyota yang memproduksi produk otomotif, khususnya mobil. Tentu saja hal ini sesuai dengan kebutuhan Indonesia akan pemenuhan lapangan pekerjaan. Keunggulan inilah yang dimiliki oleh pasar Jepang yang melakukan investasi dalam bentuk investasi secara langsung.

Selain itu, investasi luar negeri Jepang memiliki beberapa keunggulan tertentu seperti manajemen, modal akses ke pasar internasional, serta jaringan usaha dan informasi ditingkat internasional. Keunggulan inilah yang dijadikan Indonesia sebagai faktor pendukung perekonomian terutama dalam industrialisasi

²⁵ Alan M. Rugman, 1985, *International Bussiness : Form and Environment*, New York : Mc Graw Hill Book, hal 78.

²⁶ *Ibid*, hal 79.

substitusi impor dan promosi ekspor dengan menggunakan jaringan investasi luar negeri Jepang yang beroperasi di Indonesia.

F. Hipotesa

Dari uraian-uraian di atas, maka hipotesa sementara yang bisa diambil adalah : Peningkatan investasi portofolio investor Jepang di Indonesia pada periode 2003 – 2004 disebabkan oleh dukungan kebijakan pemerintah dibidang investasi portofolio yang kondusif untuk menarik para investor asing.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan penting ditetapkan agar kajian ini bisa lebih terfokus dan agar permasalahan tidak terlalu meluas. Dengan alasan tersebut maka penulis menetapkan batasan waktunya adalah antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004. Selain itu, penelitian dilakukan hanya pada investasi portofolio saja.

Meskipun demikian, penulis tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data-data di luar jangkauan yang sudah ditentukan selama masih mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat.

H. Metode Pengumpulan Data

Teknik penulisan yang dilakukan adalah dengan studi literatur dan pengumpulan data-data atau informasi dari berbagai media cetak seperti buku,

majalah, makalah, koran dan juga media elektronik seperti televisi dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Metode analisa data yang dilakukan adalah setelah semua data yang diperoleh dari literatur, media cetak maupun media elektronik dikumpulkan, data-data tersebut diklasifikasikan, kemudian dimasukkan ke dalam tulisan sesuai dengan data yang diperlukan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I

Dalam bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teoritik, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

Bab ini merupakan gambaran umum investasi portofolio Jepang di Indonesia. Bab ini membahas mengenai sekilas pertumbuhan ekonomi Jepang, pengertian penanaman modal asing (PMA), tujuan investasi portofolio Jepang di Indonesia, dan perkembangan investasi portofolio Jepang di Indonesia baik pada masa krisis maupun pada periode 2003 – 2004.

BAB III

Bab ini berisi tentang kondisi perekonomian Indonesia. Bab ini membahas mengenai sekilas perkembangan ekonomi Indonesia, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga SBI-3 bulan dan harga minyak internasional, tingkat ekspor Indonesia dan tingkat impor Indonesia.

BAB IV

Bab ini berisi tentang penyebab meningkatnya investasi portofolio Jepang di Indonesia pada periode 2003 – 2004. Diantaranya yaitu dukungan kebijakan pemerintah dibidang investasi portofolio yang kondusif untuk menarik para investor asing dan kondisi ekonomi makro dan moneter di Indonesia.

BAB V

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.